

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 06/01/2009

Subyek :

Hari : Selasa

Kata Kunci :

Halaman : 23

### **Banjir Meluas, Warga ke Bukit**

Luapan Sungai Mahakam makin meluas. Tak kurang dari 73 kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tergenang. Akibatnya, 93 keluarga dari 8.927 keluarga yang rumahnya kebanjiran terpaksa mengungsi ke perbukitan.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Sri Wahyuni di Tenggarong, Senin (5/1), warga yang rumahnya kebanjiran tinggal di tujuh kecamatan, yaitu Sebulu sebanyak 3.000 keluarga, Muara Wis (620 keluarga), Muara Kaman (2.315 keluarga), Muara Muntai (1.448 keluarga), Kenohan (1.054 keluarga), Kotabangun (342 keluarga), dan Kembang Janggut (148 keluarga).

Banjir setinggi 1-2,5 meter sejak pertengahan Desember 2008 itu memaksa 15 keluarga di Sebulu, 28 keluarga di Kotabangun, dan 50 keluarga di Muara Kaman mengungsi ke tenda di perbukitan.

Warga dilaporkan mulai mengalami masalah kesehatan. Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Sjachruddin menyatakan akan menurunkan tim kesehatan dan minta PDAM menyalurkan air bersih.

Kabupaten yang berpenduduk 547.422 jiwa dan dilintasi Sungai Mahakam itu setiap tahun kebanjiran. Banjir sebenarnya kiriman dari hulu Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Barat.

Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaludin, Senin, menyatakan, curah hujan di Kalimantan masih tinggi sepanjang bulan Januari 2009. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir diharapkan tetap waspada.

### **Banjir dan longsor**

Sementara itu, empat kabupaten di pantai timur dan tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yaitu Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah, dilanda banjir dan tanah longsor. Ratusan keluarga terpaksa mengungsi.

Meski banjir sudah memasuki hari kedua, data kerusakan dan pengungsi belum masuk ke Kantor Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NAD. "Datanya belum ada sama sekali. Mungkin karena libur," kata Manajer Pusat Pengendalian dan Operasi Satkorlak PBP Provinsi NAD Iskandar, Senin.

Iskandar mengaku pihaknya tidak memiliki nama para pejabat Satkorlak di daerah karena sering berganti.

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh selama dua hari terakhir mengakibatkan longsor di Takengon, Aceh Tengah, dan ruas jalan Tangse-Meulaboh, Kabupaten Pidie Jaya.

Di Kota Langsa, ratusan rumah di tiga desa di Kecamatan Langsa Lama terendam akibat meluapnya Sungai Langsa.

Di Kabupaten Aceh Tengah, sebanyak 19 keluarga (sekitar 70 jiwa) warga Dusun Jamur Laya, Desa Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, mengungsi karena rumah mereka diterjang tanah longsor. Hujan deras yang mengguyur Kota Takengon dan sekitarnya mengakibatkan perbukitan Ulu Nuwih longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah, Bardah Sahidi, yang dihubungi lewat telepon mengatakan, saat ini puluhan pengungsi tidur di gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulu Nuwih.

Menurut Bardah, selama ini penduduk menanam kopi, jeruk, pepaya, dan sayur-mayur di perbukitan. Tidak ada pohon kayu keras untuk menahan gerusan air hujan.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono beberapa waktu lalu menyatakan, wilayah tengah Aceh, termasuk Bukit Barisan, memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

Sementara itu, banjir tahunan di Medan akibat meluapnya Sungai Deli sulit teratasi meski proyek banjir kanal (Medan Flood Way) sudah dioperasikan Desember lalu. Daerah bantaran Sungai Deli, terutama di sepanjang Kelurahan Sei Mati hingga Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimon, akan tetap mengalami banjir tahunan.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Yani Sulastri Siregar, banjir di bantaran Sungai Deli tak bakal teratasi selama penduduk masih bermukim di sana.

Balai Wilayah Sungai Sumatera II, kata Yani, sebenarnya mendapat bantuan proyek pengendalian banjir di Sungai Deli dari Bank Pembangunan Asia. Namun, syaratnya, pemerintah daerah harus mampu membebaskan areal bantaran sungai dari permukiman penduduk.

Menurut Yani, pemerintah daerah tidak mampu membebaskan bantaran Sungai Deli.